

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberagaman kondisi geografis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan risiko bencana alam yang cukup tinggi. Kabupaten dan kota di Indonesia terletak di dataran rendah, dataran tinggi, serta terdapat juga kabupaten atau kota yang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan kondisi geografis tersebut maka bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana geologi (*geological hazards*) seperti gempa bumi, longsor, gunung meletus dan bencana hidrometeorologi (*hydrometeorology hazards*) seperti curah hujan ekstrem, dan banjir.

Bencana yang terjadi di Indonesia dapat dipicu oleh 3 faktor yaitu faktor alam, manusia, hingga sosial. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam seperti tanah longsor, kekeringan, gempa bumi hingga gunung meletus. Bencana yang terjadi karena faktor manusia antara lain pencemaran udara, polusi sungai, hingga kebakaran hutan. Kemudian bencana yang disebabkan oleh faktor sosial seperti aksi tawuran, sabotase hingga terorisme.

Bencana alam yang cukup sering melanda daerah-daerah di Indonesia adalah banjir. Khususnya daerah yang terletak di dataran rendah, pesisir, dan dekat dengan aliran sungai. Banjir merupakan bencana alam dimana suatu wilayah terendam oleh air sungai karena debit air yang masuk tidak seimbang dengan daya tampung, atau dapat

juga dikatakan sebagai banjir apabila suatu wilayah tidak memiliki sistem saluran air yang baik sehingga terjadi genangan. (Achmad Husein, 2017)

Banjir yang terjadi seringkali disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manusia dan juga murni karena peristiwa alam. Banjir yang disebabkan oleh faktor manusia dapat dikatakan sebagai dampak dari perilaku manusia itu sendiri, seperti membuang sampah ke aliran sungai, dan membuat pemukiman di tempat yang seharusnya menjadi daerah resapan air. Kemudian banjir yang disebabkan oleh peristiwa alam itu sendiri, seperti terjadinya curah hujan yang tinggi sehingga sungai meluap karena volume air yang masuk melebihi kapasitas.

Banjir dapat terjadi di mana saja, termasuk di kabupaten Bandung. Kondisi geografis kabupaten Bandung dapat dikatakan menarik karena terdiri dari dataran tinggi berbentuk cekungan, sehingga ketika ada alih fungsi lahan yang tidak tepat dapat memicu terjadinya banjir utamanya di daerah yang dekat dengan aliran sungai. Banjir yang terjadi di kabupaten Bandung merupakan permasalahan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Bencana banjir tersebut memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat baik dari segi ekonomi dan juga psikologis. Secara ekonomi, masyarakat mengalami kerugian setiap kali banjir terjadi karena hilang harta bendanya, sedangkan secara psikologis setiap musim penghujan datang masyarakat akan merasa cemas, takut akan dampak yang akan mereka dapat ketika terjadi banjir.

Tabel 1. 1

Indeks Risiko Bencana Banjir di 397 Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2021

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
160	Kota Surabaya	Jawa Timur	26.73	Tinggi
161	Kota Bekasi	Jawa Barat	26.44	Tinggi
162	Kota Pekalongan	Jawa Tengah	26.42	Tinggi
163	Pegunungan Bintang	Papua	26.40	Tinggi
164	Tanjung Jabung Barat	Jambi	26.39	Tinggi
165	Kota Madiun	Jawa Timur	26.06	Tinggi
166	Bandung	Jawa Barat	25.81	Tinggi

Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2021)

Berdasarkan data tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Bandung berada di peringkat 166 dari total 397 Kabupaten/Kota dengan indeks skor sebesar 25.81 dan masuk kedalam kategori risiko tinggi bencana banjir. Dimana berdasar kepada satuan yang sudah ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana indeks risiko bencana diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan yaitu: skor 0-4.00 risiko rendah, 5.00-16 risiko sedang, dan 17.00-36.00 risiko tinggi. Ini menandakan bahwasanya bencana banjir di Kabupaten Bandung menjadi salah satu permasalahan vital yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung dari total 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, terdapat tiga kecamatan yang memiliki risiko banjir di atas rata-rata, yaitu :

Tabel 1. 2

Kecamatan dengan Risiko Banjir Tertinggi di Kabupaten Bandung 2019

NO.	KECAMATAN	KK TERDAMPAK
1	Kecamatan Baleendah	8.055
2	Kecamatan Bojongsoang	6.115
3	Kecamatan Dayeuhkolot	8.474

Sumber : (BPBD Kabupaten Bandung, 2019)

Berdasarkan data tabel tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling terdampak oleh bencana banjir di Kabupaten Bandung, dimana pada rentang waktu Januari sampai dengan Maret tahun 2019 jika ditotalkan maka tercatat 22.644 KK terdampak oleh bencana banjir di wilayah tersebut. Hal ini bisa terjadi karena dua faktor utama, yaitu faktor alam dan juga non-alam di ketiga kecamatan tersebut. Faktor alam sendiri merupakan faktor terjadinya banjir karena bagian dari peristiwa alam itu sendiri, seperti daya tampung sungai, debit air masuk, hingga curah hujan di wilayah tersebut. Kemudian faktor non-alam seperti kebiasaan ataupun perilaku masyarakat di wilayah tersebut, seperti membuat pemukiman di daerah resapan air hingga membuang sampah ke sungai.

Tabel 1. 3

Data Curah Hujan Stasiun Geofisika Bandung

NO	BULAN	TAHUN	CURAH HUJAN (mm)	KATEGORI
1	Januari	2019	231	Menengah
2	Februari	2019	269	Menengah
3	Maret	2019	223	Menengah

Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2019)

Dapat dilihat dari tabel di atas kurun Januari hingga Maret 2019, Stasiun Geofisika Bandung mencatat bahwasanya tingkat curah hujan yang terjadi masuk ke dalam kategori menengah, dimana normal curah hujan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah (100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). Dengan berbekal kondisi geografis yang mayoritas berupa dataran tinggi, seharusnya pemerintah Kabupaten Bandung bisa berbenah dengan menata kembali alih fungsi lahan, karena beberapa wilayah berkarakter sebagai daerah pelepasan air tanah, dimana itu berarti air tidak dapat terserap sepenuhnya di daerah tersebut sehingga berisiko menimbulkan genangan hingga banjir, kemudian memperbaiki jaringan irigasi, drainase untuk menghindari genangan banjir dan sedimentasi di lokasi-lokasi tersebut sesuai dengan prinsip ekologi yang mengutamakan aspek lingkungan.

Menurut UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah kegiatan yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah terjadinya suatu bencana dengan maksud pencegahan dan pemulihan dari dampak bencana yang dihasilkan. Tujuan dari penanggulangan bencana itu sendiri adalah sebagai bentuk hadirnya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menjamin pelaksanaan proses penanggulangan bencana yang terkoordinasi, terpadu, terencana, dan menyeluruh. Berdasarkan ketentuan di atas, dalam rangka menanggulangi permasalahan banjir di Kabupaten Bandung, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung serta diatur melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Tata Kerja, dan Fungsi BPBD Kabupaten Bandung.

Pemerintah harus berpedoman pada peta risiko bencana di wilayahnya. Sehingga dalam prosesnya mitigasi dan kegiatan peningkatan ketanggapan bencana akan semakin tepat sasaran. Pemerintah bertanggung jawab dalam permasalahan ini karena pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam beberapa bidang, salah satunya adalah dalam penanggulangan bencana ini sebagai salah satu bentuk pelayanan sosial. (Rakhmat, 2018) Serta dengan terus melakukan koordinasi dengan masyarakat, semua program penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung akan terlaksana dengan harmonis, karena didasari oleh rasa saling membutuhkan dan penuh tanggung jawab.

Berdasar kepada permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas topik mengenai penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bandung. Adapun judul yang penulis angkat yaitu “Manajemen Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi bahwa masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah masih terdapatnya sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi terjadinya bencana banjir, kecamatan-kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Baleendah, Kecamatan Dayeuhkolot, dan Kecamatan Bojongsoang. Dari total 31 kecamatan di Kabupaten Bandung, 3 kecamatan tersebut yang paling sering mengalami bencana banjir terutama di musim penghujan.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana manajemen bencana dalam rangka penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dalam penanggulangan banjir, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap penanggulangan banjir di Kabupaten Bandung, serta memberikan pengetahuan baru bagi penulis, pembaca, serta berkontribusi bagi penelitian lainnya sebagai bahan referensi dalam pengkajian permasalahan tentang penanggulangan banjir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan aktif pemerintah dalam proses penanggulangan banjir, dan bagi pemerintah daerah khususnya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan untuk perumusan kebijakan dalam rangka menanggulangi banjir di Kabupaten Bandung.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebuah penelitian diharuskan berpedoman pada teori yang relevan, dengan maksud agar penelitian tidak dipertanyakan keabsahannya. Dalam penelitian ini digunakan tiga teori, yaitu :

Pertama, *Grand Theory* yang digunakan adalah teori administrasi publik. Mengutip Nicholas Henry dalam Harbani Pasolong (2019:9) mendefinisikan bahwa: “Administrasi publik adalah kombinasi yang bersifat kompleks antara teori dan praktik, tujuannya untuk mendorong agar kebijakan publik lebih peka dan responsif terhadap

kebutuhan yang ada di masyarakat, juga memberikan pemahaman antara pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah dengan ruang lingkup meliputi organisasi publik, manajemen publik dan implementasi kebijakan”

Kedua, *Middle Theory*, teori yang digunakan adalah manajemen publik. Ott, Hyde & Shafritz (Wijaya:2017) mendefinisikan manajemen publik sebagai berikut:

“Manajemen publik ialah cabang dari administrasi publik yang secara spesial mangulas keilmuan terhadap desain program serta restrukturisasi, operasional dalam organisasi, alokasi sumberdaya lewat manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, sistem penganggaran serta evaluasi program dan audit..”

Ketiga, *Applied Theory*, teori yang digunakan peneliti adalah teori manajemen bencana, menurut Khambali:2017 didefinisikan bahwa manajemen bencana adalah tahapan prabencana, saat bencana, dan pascabencana. Untuk daerah-daerah yang kerap tertimpa bencana, entah itu yang dibuat manusia ataupun yang tak terduga secara awam, dan menerapkan tahapan-tahapan kerja yang lebih mendetail .

Gambar 1. 1

Kerangka Pemikiran

